**KOLONIALISME MENCENGKRAM *TELLU LIMPOE*: PERUBAHAN
POLITIK DAN TATANAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DI SINJAI,
SULAWESI SELATAN, 1861-1942**

***COLONIALISM HOLDING OF TELLU LIMPOE: POLITICAL CHANGES
AND THE GOVERNMENT BUREAUCRACY ORDER IN SINJAI, SOUTH
SULAWESI AT 1861-1942***

Khaerul Amri

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kota Makassar, 90245

Email: pmaloloe@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.240

Naskah Diterima: 04 Januari 2021 Naskah Direvisi: 16 Agustus 2021

Naskah Disetujui: 06 September 2021

Abstrak

Penelitian ini akan membahas tentang Perubahan politik di wilayah *Ooster Districten* pada masa kekuasaan kolonial. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yang menjelaskan persoalan penelitian berdasarkan perspektif sejarah. Prosedurnya meliputi empat tahapan, yaitu pencarian dan pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (seleksi data), interpretasi (penafsiran), dan penyajian atau penulisan sejarah (historiografi). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kolonialisme telah merubah wajah *Tellu Limpoe*. Sistem kerajaan serta wilayahnya diubah menjadi lebih modern ala Belanda yang kemudian diikuti dengan hilangnya kedudukan kaum pribumi. Keadaan ini berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Sinjai.

Kata Kunci: Politik, Pemerintahan, *Ooster Districten*, Sinjai

Abstract

This research discusses the political changes that occurred in the Ooster Districten area during colonial domination. The historical method was used in this study to explain the research problem from a historical standpoint. The procedure consists of four stages: source search and collection (heuristics), source criticism (data selection), and interpretation, as well as the presentation or writing of history (historiography). According to the findings of this study, colonialism has altered the image of Tellu Limpoe. The royal system and territory were changed to a more modern Dutch style, which

resulted in the natives losing their position. This situation persists until the end of Netherland Indie's reign in Sinjai.

Keywords: *Politics, Government, Ooster Districten, Sinjai*

PENDAHULUAN

Historiografi mengenai sejarah lokal di Indonesia, masih banyak menyimpan obyek kajian yang belum terungkap hingga sekarang. Penelitian sejarah lokal dengan kemajemukan masyarakat Indonesia, diharapkan mampu memperkaya khasanah sejarah nasional dari belahan Nusantara. Penelitian sejarah lokal biasanya menyangkut asal-usul pertumbuhan dan perkembangan ataupun kemunduran dari kelompok masyarakat lokal termasuk berbagai etnis kultural yang ada didalamnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sejarah lokal mempunyai ruang lingkup yang terbatas dan biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah. Wilayah yang relatif sempit biasanya lebih penting sejarahnya jika dibandingkan dengan daerah yang lebih luas (Abdullah, 1985: 18).

Begitupun dengan dinamika kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan pada masa kolonial. Pemerintah kolonial mulai menduduki kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan didasarkan pada Perjanjian Bongaya yang diperbaharui pada tahun 1824. Salah satu pasal dari perjanjian tersebut mengisyaratkan adanya tuntutan pemerintah Belanda atas pengakuan kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Sedangkan monopoli perdagangan di kepulauan Maluku tidak lagi diutamakan. Untuk merealisasikan perjanjian tersebut, pemerintah Belanda berhasil menguasai negeri-negeri bagian timur Sulawesi Selatan. Sebagaimana termaktub dalam pasal enam perjanjian tersebut yang berbunyi bahwa batas-batas daerah kepentingan Gubernur akan ditetapkan kemudian. Dengan demikian daerah kekuasaan Belanda setiap saat bisa diperluas termasuk kerajaan-kerajaan dalam konfederasi Tellu Limpoe sebagaimana maksud dari potongan pasal tersebut (Patunru, 1989: 95).

Pemerintah Hindia Belanda berhasil menaklukkan Tellu Limpoe dan menjadikan daerah ini berstatus *Gouvernementlanden* (daerah taklukan) dan memasukkan seluruh bekas wilayahnya kedalam *Ooster Districten* (Distrik-distrik Bagian Timur) pada 1861. Tetapi pemerintah Hindia Belanda baru bisa menanamkan kekuasaannya secara menyeluruh di Sulawesi Selatan kurun waktu

antara 1906-1942. Pada masa itu, pemerintah Kolonial Belanda melakukan usaha penguasaan dengan mengirim pasukan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pengiriman pasukan tersebut dikenal dengan istilah Ekspedisi Militer (*militaire expeditie*) 1905. Ekspedisi ini dilakukan berdasarkan kebijakan politik eufinis yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Joannes Benecditus van Heutzs (1904-1909). Ekspedisi ini dikenal juga dengan sebutan “politik perdamaian” (*pasficatie politiek*) pada masa Gubernur Sulawesi Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906). Ekspedisi ini bertujuan untuk memaksa penguasa-penguasa di wilayah Sinjai khususnya dan wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya untuk tunduk, patuh dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah Kolonial Belanda (Poelinggomang, 2004: 2).

Adapun tujuan pemerintah kolonial Belanda menguasai secara langsung wilayah tersebut adalah ketenangan dan ketertiban (*rust en orde*). Hal ini dinyatakan oleh petinggi pemerintah Kolonial Belanda seperti J. H. van Kol, van Deventer dan Cremer. Pemerintah Kolonial selanjutnya menempatkan diri sebagai penguasa yang sah dan melakukan tugas-tugas pemerintahan. Dengan kata lain pemerintah kolonial juga melakukan kekuasaan langsung terhadap rakyat yang dinyatakan melalui *Korte Verklaring* (surat pernyataan pendek). Setelah penandatanganan surat pernyataan pendek dilakukan, pemerintah Hindia Belanda sudah menjadi penguasa seutuhnya di wilayah *Tellu Limpoe* (Sulistyo, 2007:11).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan membahas tiga permasalahan utama. Permasalahan pokoknya adalah “Bagaimana dinamika dan efek kolonialisme dalam penataan pemerintahan di Tellu Limpoe 1861-1942?”. Dalam membahas artikel ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kunci yang sekaligus menjadi rumusan masalah agar mempermudah dalam mengarahkannya. Pertanyaan tersebut antara lain: (1) Bagaimana proses terbentuknya *Ooster Districten*?; (2) Bagaimana penataan pemerintahan setelah pemerintah kolonial menanamkan pengaruhnya di Tellu Limpoe?; (3) Bagaimana perkembangan pemerintahan setelah Sulawesi Selatan ditaklukkan secara utuh? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses terbentuknya *Ooster Districten*; (2) mengetahui penataan pemerintahan setelah pemerintah kolonial menanamkan pengaruhnya di Tellu Limpoe; dan (3) untuk mengetahui

perkembangan pemerintahan setelah Sulawesi Selatan ditaklukkan secara utuh.

Bertolak dari permasalahan tersebut, hal ini perlu diungkapkan dan dijelaskan secara utuh. Dengan tulisan ini diharapkan menjadi bahan renungan kemudian memahaminya secara saksama. Dengan demikian kita bisa lebih arif dalam berdialog dengan masa lampau itu; membuka diri secara jujur dan penuh toleransi agar kita dapat menjadi lebih arif dan bijaksana dalam membangun kekinian dan hari esok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian yang dimaksud adalah menganalisis kejadian sejarah secara kritis dengan merekonstruksi kembali kejadian masa lalu sesuai kaidah-kaidah ilmiah dari ilmu sejarah. Adapun metode tersebut disebut sebutan metode sejarah dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan dalam bentuk narasi sejarah.

Dalam menulis artikel ini, dimulai dengan studi arsip dan kepustakaan (*library research*) serta mengumpulkan sumber primer berupa arsip-arsip yang erat kaitannya dengan Sinjai pada masa kolonial. Sumber primer berupa arsip yang digunakan adalah dokumen-dokumen pemerintah pada periode 1900-an. Setelah mengumpulkan berbagai arsip dan dokumen kemudian menganalisisnya melalui tahapan kritik sumber. Setelah kritik sumber, dilakukan interpretasi data untuk memperoleh kumpulan fakta sejarah kemudian merekonstruksinya menjadi narasi sejarah Kolonialisme mencengkram Tellu Limpo: Perubahan Politik dan Tatahan Birokrasi Pemerintahan dari Konfederasi Menuju *Onderafdeling* Sinjai 1861-1942.

PEMBAHASAN

Terbentuknya *Ooster Districten*

Tellu Limpo merupakan suatu federasi kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan yang kini wilayahnya menjadi suatu kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai. Federasi *Tellu Limpo* secara etimologis terdiri atas dua kata yaitu *Tellu* yang berarti tiga, dan *Limpo* (*Limpu*) yang berarti tempat. Federasi ini merupakan

daerah atau wilayah pemerintahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Arung* atau Raja. Kerajaan *Tellu Limpoe* meliputi tiga buah kerajaan otonom yang mempunyai perserikatan yaitu Kerajaan *Tondong*, Kerajaan *Bulo-Bulo*, dan Kerajaan *Lamatti*. Pada akhir abad XV ketiga negeri ini mengikrarkan diri sebagai negeri bersaudara dalam konfederasi *Tellu Limpoe* (Mattulada, 1994: 8).

Sebagai kerajaan yang berserikat, ketiga kerajaan dalam konfederasi ini masing-masing memiliki wilayah kekuasaan sebagaimana yang tertuang dalam Lontara *Bulo-Bulo*. Dalam Lontara tersebut disebutkan bahwa Kerajaan *Tondong* memiliki wilayah kekuasaan yang terdiri dari Kampala, Pao, Salohe, Lengkesa, Tokka, Kolasa, dan Camba. Adapun wilayah Kerajaan *Bulo-bulo* adalah Saukang, Rombo, Mattoanging, Bontopale, Kaloling, Maroanging, Biringere, Pattalassang, Sanjai, Bua, Pattongko, Mannanti, Biroro, Bikeru, Talle, Bulu, Takkuro, Saoanging, Ammessing, Serre, Nangka, Baringeng, dan Kalaka. Sedangkan Kerajaan *Lamatti* yang berbatasan langsung dengan Kerajaan Bone ini terdiri dari Bongki, Panreng, Lappa, Balangnipa, Aruhu, Jerrung, Bulupoddo, Mangngopi, Sereng, Barang, Cenrana, Raja, dan Kading. (Kamaruddin, 1966: 3-5)

Pada awal tahun 1859 Sinjai menjadi tempat agresi perang antara pasukan Belanda dengan Kerajaan Bone. Pada periode itu, Bone masih memiliki pengaruh yang kuat di Sinjai. Sehingga sebelum Belanda menaklukkan Bone yang dikenal memiliki pengaruh besar terhadap beberapa kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, terlebih dahulu harus menaklukkan Sinjai. Terlebih kerajaan-kerajaan yang ada di Sinjai secara administratif berbatasan langsung dengan Kerajaan Bone seperti yang telah digambarkan sebelumnya. Penaklukan Sinjai juga bertujuan untuk mengurangi bantuan kepada kerajaan Bone jika Belanda melancarkan ekspedisi di kerajaan tersebut.

Pada akhirnya pertempuran hebat terjadi di Sinjai. Pertempuran tersebut oleh masyarakat lokal dikenal dengan istilah *Rumpa'na Mangarabombang*. Pada peristiwa ini, Belanda mengirim pasukan dibawah pimpinan Colonel Waleson. Pasukan Waleson dilengkapi dengan kapal-kapal “Johanna Gertruida”, “Elizabet”, “Alblaserdam” (kapal ini mengangkut battalion III infantry), kapal perawatan medis “Arcadia”, dan kapal Vivres, kapal perbekalan “Neptunus”

meninggalkan Bantaeng. Colonel Waleson bertugas untuk mengadakan pengintaian, terutama kekuatan musuh yang ada di Sinjai. Ada dua hal yang diharapkan dengan pengintaian ini. Pertama untuk mendapatkan kepastian bahwa semua kapal angkut dapat tiba di Teluk Bone tanpa hambatan. Kedua agar Kerajaan Bone tidak mengetahui secara pasti sasaran serangan apakah Sinjai atau Bone, sehingga Kerajaan Bone harus memecah kekuatan tempurnya untuk mengawasi kedua tempat tersebut (Mappangara, 1996: 190-191).

Setelah seluruhnya berjalan lancar dan sesuai dengan perkiraan semula, seluruh pasukan Belanda bertolak meninggalkan Bantaeng dan tiba di Sinjai pada tanggal 3 Februari 1859. Keesokan harinya konvoi pasukan ini bergerak menuju Bajoe. Setelah sampai di sana pada tanggal 6 Februari pasukan Belanda memberikan surat ultimatum kepada Raja Bone agar mengakui kekuasaan Belanda dan bersedia menandatangani Perjanjian Bongaya yang telah diperbaharui 1824 (Perelaer, 1872:186).

Ultimatum itu tidak diindahkan oleh Kerajaan Bone, sehingga terjadi penyerangan yang dipimpin oleh Mayor Jendral Steinmentz. Penyerangan dilakukan di dua tempat yaitu Lona, dan Cenrana. Usaha keras yang dilakukan oleh Belanda terhambat oleh kondisi alam yang tidak bersahabat. Selain karena keadaan geografis yang sulit, juga diperparah dengan datangnya musim hujan. Musim hujan menyebabkan keadaan kesehatan pasukan Belanda sangat memprihatinkan, ditambah pula dengan merebaknya penyakit kolera. Keadaan itu melandasi keputusan pasukan Belanda untuk meninggalkan Bajoe dan kembali ke Makassar (Mappangara, 1996: 196).

Pada tanggal 19 November 1859 pasukan Belanda kembali dipersiapkan di Bulukumba kemudian diberangkatkan menuju Kajang dan Sinjai. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jendral Jan van Swieten, komandan *Indische leger* dan kepala stafnya Mayor Inf. Staring. Pasukan yang dikirim terdiri atas (angkatan darat) battalion 4 yang dipimpin oleh Mayor Kroesen, battalion 11 yang dipimpin oleh Mayor Jallink, dan battalion 5 dipimpin oleh Mayor Heisterkemp. Pasukan ini juga dilengkapi dengan battalion *Garnisumn Celebes* dan Manado. Kesatuan Kavaleri terdiri dari kavaleri Salatiga dan pasukan kavaleri *Celebes* yang dipimpin oleh Mayor Wolff. Selain pasukan angkatan darat, agresi militer

ini dilengkapi juga dilengkapi dengan kekuatan angkatan laut yang terdiri dari kapal uap Gedeh, Admiral van Kinsbergen, Madura dan juga Phoenix, *korvet* uap Madusa, kapal uap baling-baling Sumbing dan Bali, *korvet* Rembang Padang, dan Lansier (Perelaer, 1872: 79-80).

Serangan atas Kerajaan Bone tidak lagi bertumpu pada laut. Kali ini Belanda memutuskan untuk mengikuti cara yang yang digunakan pada agresi militer yang pertama ditahun 1825. Sesuai dengan rencana tersebut, pasukan Belanda yang ditugaskan bergerak dengan berjalan kaki menuju Sinjai. Agresi militer ini menempuh jalan darat menuju Sinjai dan berhasil menaklukkan Sinjai. (Mappangara, 1996: 199-200).

Kekalahan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian Bongaya yang telah diperbaharui. Berdasarkan Perjanjian Bongaya, daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Hindia Belanda pada waktu perang Makassar dinyatakan berada di bawah kekuasaanya. Dengan demikian wilayah yang dahulunya dibawah pengaruh konfederasi Tellu Limpoe kemudian melebur dengan turut bergabung kedalam Distrik-Distrik Bagian Timur (*Ooster-Districten*) meliputi: Tondong, Bulu-Bulu, Lamatti, Gantarang, Ujung Loe, Bulukumpa, Manimpahoi, Manipi, Turungeng, Kajang, Bira, dan Jojolo. Selain itu, daerah pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan juga meliputi: Afdeling Makassar yang berpusat di Makassar, Afdeling Noorden districten berpusat di Maros, dan Afdeling Zuider Districten berpusat di Takalar, serta Afdeling Ooster Districten yang berpusat di Balangnipa (Limbugau, 1985: 64).

Penataan Pemerintahan

Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya menanamkan kekuasaan di Sinjai setelah terbentuknya *Ooster Districten*. Pemerintah kolonial menjadikan daerah ini sebagai *Gouvernementlanden* (daerah taklukan) setelah melantik Abd. Gani sebagai regent I Bulu-Bulu pada tahun 1861. Tak hanya itu, pada bulan April 1862, pemerintah Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal melakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Balang Nipa ke Manipi sebagai simbol otoritas pemerintahan yang baru. Pemindahan tersebut disebabkan oleh perlawanan sejumlah dewan adat di daerah tersebut. Distrik Manipi dan

Turungan belum mau mengakui kewenangan Pemerintah Hindia Belanda. Para pimpinan kerajaan terus menolak bahkan tidak mau tunduk terhadap pemerintah. Dewan adat juga berusaha membujuk Kerajaan Lamatti yang telah ditaklukkan untuk melawan.

Untuk mengakhiri gejolak tersebut, pada bulan April, Gubernur berangkat dengan kekuatan militer yang cukup kuat melintasi Balangnipa ke Manipi. Sementara itu, pangeran Gowa dengan kekuatan yang cukup besar juga bergerak melalui darat ke wilayah kekuasaannya di Suka dan Balasuka untuk melumpuhkan Manipi dan Turungan yang terus menentang Pemerintah Hindia Belanda. Sebelum menggunakan kekerasan, Gubernur mendesak pimpinan kerajaan untuk terakhir kalinya agar tunduk secara langsung. Untuk itu sang komisaris kembali ke Manipi dan berhasil menjalankan misinya. Keesokan harinya, pimpinan kerajaan dan seluruh dewan adat meminta maaf atas nama *Wanau* (wilayah) Manipi dan berjanji akan tunduk terhadap pemerintah. (Kolonial Verslaag tahun 1862).

Otoritas pemerintahan yang baru ini begitu mempengaruhi. Para raja di wilayah Tellu Limpoe yang dulunya sebagai pemegang pucuk pimpinan dan menentukan segala kebijakan, kini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Hak kekuasaan yang dimiliki oleh raja sedikit-demi sedikit berkurang. Dalam hal pengambilan keputusan harus seizin pemerintah kolonial. Struktur pemerintahan yang baru jelas menampakkan jurang pemisah antara pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda dan pelaksanaan pemerintahan bumiputra. Dipihak pemerintah Hindia Belanda, kontroleur ditempatkan sebagai pejabat terendah dan dipihak lainnya penguasa lokal dijadikan sebagai pejabat tertinggi bumiputra. Bentuk penataan administrasi pemerintahan ini menunjukkan adanya penumpangan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di atas kekuasaan Bumiputra.

Perubahan tatanan birokrasi juga diikuti oleh hilangnya kedudukan politik, ekonomi dan sosial pada kaum bangsawan dan pejabat lokal yang berakibat pada hilangnya sumber pendapatan. Jika dahulunya pejabat lokal bisa mengambil alih pajak atas tanah rakyat atau memungut upah pertanian maka setelah “pembajakan” kekuasaan mereka tidak bisa lagi melakukannya. Hak-hak istimewa yang dimilikinya dicabut sehingga kedudukannya sama seperti orang

pribumi. Dengan kata lain, pemerintah Kolonial Belanda hanya menjadikan raja dan bangsawan sebagai simbol dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal inilah yang memicu berbagai perlawanan di Sinjai.

Perlawanan terhadap kolonialisme di Sinjai salah satunya dipelopori oleh Massalinri Dg. Mallira pada tahun 1871. Perlawanan ini sebagai simbol keresahan atas tatanan pemerintahan gaya kolonial yang baru. Betapa tidak, dari ayahnya Salolang Dg. Palili yang merupakan Aru Pangasa dan Ibu yang bernama Ipada Daeng Tamene, seorang putri Arung Tondong berhasil melahirkan seorang putra yang gagah berani. Darah bangsawan yang mengalir dalam diri Massalinri memaksanya untuk mempertahankan haknya. Hal ini dapat dibuktikan melalui perlawanan Massalinri bersama para pengikutnya dalam melancarkan serangan terhadap militer Belanda. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 24 Mei 1871 bertempat di Cakkempong. Massalinri berhasil memenangkan pertempuran tersebut sehingga pasukan Belanda terpaksa mundur ke pusat pangkalan militer yang ada di Balang Nipa (Rasyid, 1989: 39-44).

Perang tersebut memicu kemarahan pemerintah Belanda yang juga berpusat di Balang Nipa. Mengetahui hal tersebut, Massalinri bersama pengikutnya akhirnya memutuskan berperang secara bergerilya sebab kalah dalam persenjataan. Militer Belanda terus mengejar Massalinri yang melarikan diri ke arah selatan kerajaan Bulu-Bulu tepatnya di Wae Pellae. Selanjutnya menuju ke selatan sampai di daerah Bikeru. Di daerah inilah kemudian terjadi pertempuran hebat antara Massalinri dengan pasukan Belanda dalam jumlah besar pada tanggal 26 Mei 1871. Massalinri bersama pengikutnya berhasil dipukul mundur hingga ke Cappa Galung Bola Roman. Massalinri akhirnya berhasil dibunuh oleh pasukan Belanda. Dengan terbunuhnya Massalinri, Pemerintah kolonial dengan bebas mengatur jalannya roda pemerintahan di Sinjai. Hal ini dapat dilihat melalui pemecahan Keregenan Bulu-bulu menjadi Bulu-Bulu Timur dan Bulu-Bulu Barat sebagaimana tertuang dalam Besluit nomor 18 tanggal 1 Februari 1872 (Staatblad No. 20).

Penataan pemerintahan dimulai dengan menghapus status kerajaan yang ada di Sinjai dan menjadikan bekas wilayah kekuasaanya sebagai *lanschap*. Jika pada masa kerajaan, wilayah Sinjai terdiri dari beberapa kerajaan dengan wilayah

tersendiri, kini wilayah itu ditiadakan. Sejumlah daerah *vassal*/taklukan, banua ataupun kampung digabungkan menjadi satu dengan sebutan *lanschap*. Tiap *lanschap* dikepalai seorang pemimpin yang disebut *Puatta*, biasanya berasal dari keluarga raja maupun tuan tanah serta orang-orang pilihan. Dalam penataan ini sedapat mungkin memperhatikan ikatan-ikatan historis yang ada diantara gabungan banua-banua tersebut (TIM Badan Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015: 135-136)

Adapun *lanschap-lanschap* di Sinjai pada masa itu adalah:

1. Lanschap Tondong.
2. Lanschap Bulu-Bulu Timur.
3. Lanschap Bulu-Bulu Barat.
4. Lanschap Lamatti.
5. Lanschap Manimpahoi.
6. Lanschap Manipi (Kamaruddin, 1996: 2-3).

Selain penataan pemerintahan, Pemerintah Hindia Belanda juga mulai mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi. Sumber ekonomi yang dimaksud adalah pertambangan, perkebunan, hasil hutan, dan hasil laut. Hal yang diharapkan dari kebijakan itu adalah pendapatan dalam bentuk pajak. Pajak merupakan salah satu strategi politik ekonomi demi mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil hasil eksplorasi tersebut. Namun, masyarakat juga merasakan hasil pajak melalui pembangunan jalan, pelabuhan, pasar, alat transportasi baik laut maupun darat (Melamba, 2011: 33).

Sejak masuknya kolonial Belanda, pajak merupakan sumber utama dalam pengisian kas negara (Hindia Belanda). Langkah awal yang ditempuh adalah dengan mengadakan pencacahan jiwa atas penduduk yang memasuki arus balik (dewasa). Selain itu, seluruh penduduk diwajibkan memiliki surat kampung (Kartu Penduduk) sehingga akan dikenakan pajak kepala, pajak usaha atau pencaharian (Bigalke, 2016: 35).

Pemerintah Kolonial menerapkan sistem pajak perorangan (*sima ulu*) dan pajak penghasilan. Penduduk diwajibkan menyeter pajak sebesar 1/10 dari pajak penghasilan untuk sekali panen seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Tiap Kearungan Distrik Bulu-Bulu Timur

No	Nama Kampung	Gelar	Jumlah Wajib Pajak
1	Biringere	Aru	516
2	Bontopale	Aru	986
3	Sanjai	Aru	746
4	Rombo	Aru	356
5	Biroro	Aru	136
6	Mannati	Aru	147
7	Pattongko	Aru	488
8	Buwa	Aru	309
9	Erolohe	Kepala	244
10	Tongke-Tongke	Kepala	472
11	Buwakang	Kepala	89
12	Pattalassang	Kepala	430
13	Kaloling	Aru	170
14	Maroanging	Aru	160
Jumlah Wajib Pajak			6259

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Tiap Kearungan Distrik Bulu-Bulu Barat

No	Nama Kampung	Gelar	Jumlah Wajib Pajak
1	Takkuro	Aru	233
2	Nangka	Aru	360
3	Sompong	Gella	365
4	Lempangeng	Aru	264
5	Kalamisu	Aru	249
6	Bongkong	Aru	209
7	Talle	Aru	735
8	Ammessing	Aru	405
9	Gareccing	Aru	112
10	Kanrung	Aru	237
11	Buwakang	Kepala	89
12	Siri	Aru	241
Jumlah Wajib Pajak			3410

Dari data tersebut diatas dapat dipahami bahwa pada akhir abad ke-19 seluruh wilayah yang tergabung dalam kearungan Distrik Bulu-Bulu telah wajib membayar pajak. Wajib pajak tersebut merupakan indikator positif dalam penerimaan pemasukan Hindia Belanda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regent Bulu-Bulu berhasil menerapkan pajak kolonial dilain pihak begitu memberatkan rakyat (Limbugau, 1985: 76).

Perkembangan Pemerintahan

Pada dasarnya bekas wilayah konfederasi *Tellu Limpoe* mulai merasakan dampak perubahan politik dan kekuasaan kolonial pada tahun 1906. Pada saat itu, perubahan sistem pemerintahan tradisional diubah menjadi lebih modern. Perubahan ini sangat berdampak kepada kepada bangsawan utamanya dalam hal perpolitikan. Hak-hak istimewa yang dimiliki pada masa kerajaan semakin pudar dan mulai tersingkirkan. Peran dalam pemungutan hasil-hasil pajak masyarakat juga berangsur-angsur berubah sebab perluasan kekuasaan kolonial merambah segala sektor.

Perluasan kekuasaan tersebut dilandasi oleh berbagai berbagai landasan seperti halnya pada daerah-daerah lain di Indonesia bahwa perluasan kekuasaan itu dilakukan dengan maksud antara lain:

1. Belanda berusaha menciptakan keamanan dan ketentraman untuk menjamin keberhasilan dari usaha-usaha penanaman modal swastanya dan modal asing lainnya di Indonesia.
2. Berusaha menguasai tanah yang potensial untuk usaha pertanian, perkebunan dan pertambangan dalam rangka memperluas usaha penanaman modal swasta.
3. Berusaha mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya di kerajaan-kerajaan di luar Jawa. (Poelinggomang, dkk, 2005: 14).

Oleh karena itu, dengan menggunakan kekuatan militernya Belanda berusaha memerangi kerajaan-kerajaan, baik yang masih merdeka maupun yang sudah terikat dengan perjanjian persahabatan atau yang sudah mengaku tunduk pada kekuasaan Hindia Belanda. Selain alasan-alasan resmi tersebut, sesungguhnya ada pula kepentingan lain didalamnya. Kepentingan itu berlaku bagi para pemegang modal yang ingin mengambil keuntungan lebih besar dari daerah yang potensial terutama dalam bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan.

Raja-raja yang berhasil ditaklukkan dipaksa untuk menandatangani pernyataan takluk kepada Pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian ini dikenal dengan nama *Korte Verklaring* atau Pernyataan Pendek yang isinya bahwa:

1. Raja-raja tersebut mengaku tunduk kepada Pemerintah Belanda.

2. Mengakui daerah kerajaannya sebagai bagian dari pada wilayah Hindia Belanda.
3. Tidak akan berhubungan dengan pemerintahan asing tanpa seizin pemerintah Belanda (Abduh, 1981: 96-97).

Perubahan tatanan birokrasi juga diikuti oleh hilangnya kedudukan politik, ekonomi dan sosial pada kaum bangsawan dan pejabat lokal yang berakibat pada hilangnya sumber pendapatan. Jika dahulunya pejabat lokal bisa mengambil alih pajak atas tanah rakyat atau memungut upah pertanian, maka setelah pengambil alihan kekuasaan mereka tidak bisa lagi melakukannya. Hak-hak istimewa yang dimilikinya dicabut sehingga kedudukannya sama seperti orang pribumi. Berbagai tuntutan dan reaksi politikpun marak terjadi akibat sedikit sekali kesempatan yang diberikan penduduk pribumi (Tashadi dkk, 1991: 36).

Penataan administrasi pemerintahan jelas menampakkan jurang pemisah antara pelaksanaan pemerintahan Belanda dan pelaksanaan pemerintahan bumiputra. Di pihak pemerintah Belanda, kontrolir ditempatkan sebagai pejabat terendah dan di pihak lainnya penguasa lokal dijadikan sebagai pejabat tertinggi bumiputra. Bentuk penataan administrasi pemerintahan ini menunjukkan adanya penumpangan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di atas kekuasaan Bumiputra.

Derajat kepemimpinan kelompok bangsawan dalam sistem pemerintahan kolonial begitu memprihatinkan bahkan menjurus kearah pelecehan. Sebagai abdi kolonial, tak banyak yang dapat dilakukan sebab sanksi militer yang sangat keras telah menanti sebagaimana ungkapan Baron berikut ini:

Meskipun pada masa pemerintahan Gubernur A. J. Baron Quarlesde Quarles (1908-1910) ada tawaran kepada bangsawan tinggi seperti Karaeng Mappanyukki dan Karaeng Bontonompo untuk bersama-sama melaksanakan pemerintahan dengan tugas sebagai mata-mata, sebagai pengawal atau bertugas mempengaruhi bangsawan lainnya agar dapat mengakui kekuasaan Belanda, akan tetapi ajakan itu justru sangat melukai perasaan mereka karenanya mereka menolak. (A.J. Baron).

Dengan kondisi yang seperti ini, para bangsawan Bersama para pengikutnya sedikit demi sedikit berani untuk melawan dan merebut kembali hak

yang telah hilang. Ini juga merupakan pernyataan sikap perjuangan anti kolonial. Pada awalnya, para bangsawan melancarkan aksinya secara tersembunyi kemudian secara terang-terangan. Semangat patriotik terus menggelora meskipun mereka sadar akan berhadapan dengan kekuatan militer yang jauh lebih kuat dan terorganisir dengan baik.

Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berjuang. Perjuangan yang mereka lakukan sedikit membuahkan hasil menjelang tahun 1930-an. Gejolak para bangsawan yang haknya telah ditiadakan mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah berusaha untuk mendekati kelompok tersebut dengan tujuan untuk mencegah kelompok bangsawan terlibat dalam organisasi sosial maupun organisasi politik. Pemulihan hak kelompok bangsawan bekas kerajaan menjadi tawaran pemerintah kolonial dalam mewujudkan keinginan itu (Kadir, 1984: 89).

Sinjai yang pada saat itu merupakan *onderafdeling* di bawah *afdeling* Bonthain juga mengalami hal yang sama. Pada awal pendudukan Belanda di Sinjai regen merupakan pejabat tertinggi kemudian mengalami perubahan menjadi adat *gemenschap* dengan kepala pemerintahannya adalah Aru atau pemerintah kepala adat. Pemerintahan kepala adat tidak bertahan lama dengan bergantinya menjadi distrik. Sinjai pada saat itu terdiri dari empat distrik dan masing-masing distrik memiliki distrik bawahan yang berbeda-beda tergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya. Pembagian distrik-distrik tersebut sebagai berikut:

1. Distrik Tondong terdapat tujuh distrik bawahan, terdiri dari:
 - a. Salohe.
 - b. Pao.
 - c. Kampala.
 - d. Lengkese.
 - e. Tokka.
 - f. Kolasa.
 - g. Tondong.

2. Distrik Bulu-Bulu Timur terdapat empat belas distrik bawahan, terdiri dari:
 - a. Biringere.
 - b. Bontopale.
 - c. Sanjai.
 - d. Rombo.
 - e. Biroro.
 - f. Mannanti.
 - g. Pattongko.
 - h. Buwa.
 - i. Eroluhe.
 - j. Tongke-Tongke.
 - k. Pattalassang.
 - l. Kaloling.
 - m. Buakang.
 - n. Maroanging.

3. Distrik Bulu-Bulu Barat terdapat sebelas distrik bawahan, terdiri dari:
 - a. Takkuro.
 - b. Nangka.
 - c. Sompong.
 - d. Lempangang.
 - e. Kalamisu.
 - f. Gareccing.
 - g. Biri.
 - h. Bongkong.
 - i. Talle.
 - j. Kanrung.
 - k. Kompang.
 - l. Ammessing.

4. Distrik Lamatti terdapat dua belas distrik bawahan terdiri dari:

- a. Bongki.
- b. Panreng.
- c. Lappa.
- d. Balangnipa.
- e. Aruhu.
- f. Jerrung.
- g. Bulupoddo.
- h. Mangopi.
- i. Sereng.
- j. Barang.
- k. Cenrana.
- l. Raja (Rasyid, 1989: 55).

Distrik bawahan tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang kepala adat (adat gemenschap). Adapun pemilihan kepala adat dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung yang diwakili oleh masing-masing kepala distrik bawahan (arung). Selain itu, pejabat daerah adat diemban oleh bangsawan lokal. Ia dipilih oleh dewan hadat setempat. Pemilihan pejabat itu mengikuti aturan kebiasaan, sehingga yang boleh dan dapat dipilih adalah bangsawan yang memiliki kemurnian darah kebangsawanan atau yang tertinggi derajat kebangsawanannya di antara anggota bangsawan di daerah itu. Disamping persyaratan ini, pemerintah Belanda menambah persyaratan lain yaitu, kesediaan dan dapat bekerjasama. Persyaratan terakhir ini yang terpenting karena pengangkatan harus mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda ("Memori van Overgave Celebes I", Bahan Arsip Den Haag: ARA, kotak AA. 205: 4).

Pemilihan kepala adat (adat gemenschap) Tondong misalnya, dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan sejak 15 Agustus 1930. Pada saat itu setiap distrik bawahan diwakili oleh dua sampai empat orang yang mewakili daerah atau kampung pada masing-masing-masing distrik bawahan. Setiap distrik bawahan diwakili oleh Arung (Aroe), Gellarang, Halifah (Khalief), ataupun Doja (Chodjah). Dari hasil pemilihan kepala adat tersebut ketujuh distrik bawahan ini

menetapkan Bagenda sebagai Aroe Tondong. (Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Bantaeng No Reg. 11).

Pemilihan ini dihadiri langsung oleh Controleur Sinjai (*Controleur van Sindjai*). Distrik bawahan yang memberikan hak suaranya sebagai berikut:

1. Salohe diwakili oleh Batji (Aroe Salohe) dan Siri (Kepala Salohe).
2. Pao diwakili oleh Tjoenke (Gellarang Pao), Mangali (Bidal Pao), dan Leho (Bidal Pao).
3. Bongki diwakili oleh Takka (Gellarang Bongki), Toenrang (Chatib Bongki), Taroepa (Gellarang Lengkesa) dan Bandoe (Chodjah Bongki).
4. Kolasa diwakili oleh Betjeleboe (Gellarang Kolasa), dan Tanja (Bidal Kolasa).
5. Kampala diwakili oleh Lanroeng (Aroe Kampala), Makkareso (Kepala Kampala), dan Sabang (Chodjah Kampala).
6. Tondong diwakili oleh Lessong (Kalief Tondong), Baddoe Kariem (Imam Tondong), dan Hamida (Chatib Tondong).
7. Tokka diwakili oleh Oekkoesoe (Chatib Timbasoang), dan Semmang (Chatib Tokka), (Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Bantaeng No Reg. 22).

Pada saat perubahan atau penataan pemerintahan terdapat total 83 kepala kampung (*Hoofden in rechstreek gebied*) yang dipulihkan. Arsip yang berjudul *Gouvernement Groote Oost Residentie en Onderhoorigheden* menjelaskan pejabat-pejabat *onderafdeling* Sinjai sebagai berikut:

1. Oost Boelo-Boelo oleh Aroeng Mappatoba.
2. Lamatti oleh Aroeng Indara.
3. Tondong oleh Aroeng Genda.
4. West Boelo-Boelo oleh Aroeng Andi Tombang.
5. Manipi oleh Aroeng Djalangkara.
6. Manimpahoi oleh Aroeng Padoepa (Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Celebes nomor 16 tahun 1936).

Dengan demikian, usaha pembaharuan struktur pemerintahan Hindia Belanda itu, merubah pengistilahan distrik menjadi daerah adat (*adat gemeenschap*). Setiap pemerintahan daerah adat dibagi-bagi lagi dalam beberapa

daerah yang disebut dengan kampung yang dipimpin oleh seorang kepala kampung. Jadi, setiap distrik berubah menjadi daerah adat dengan wilayah kekuasaannya masing-masing. Dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda daerah adat dijadikan sebagai wilayah pemerintahan bagi pejabat pemerintah bumiputra, bagian serta bawahan dari wilayah cabang pemerintah dan kontrolir.

Untuk menentukan wilayah daerah adat, secara umum ditentukan berdasarkan pada latar belakang sejarah dari wilayah itu sebagai suatu kesatuan pemerintah lokal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan bangsawan dalam melaksanakan pemerintahan. Kedudukan tersebut berlangsung hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1942.

PENUTUP

Kolonialisme Hindia Belanda di *Tellu Limpoe* layaknya pedang Damaskus yang bersifat superplastis. Pedang fenomenal ini memiliki kemampuan deformasi tetap, tanpa retak hingga seribu persen. Betapa tidak kolonialisme ini berhasil merubah wajah seluruh kerajaan yang ada beserta semua unit penting didalamnya menjadi lebih modern. Sinjai yang dulunya tergabung dalam konfederasi *Tellu Limpoe* ditaklukkan lalu dijadikannya *Gouvernementlanden*. Konfederasi kerajaan yang berdaulat dilebur kedalam distri-distrik bagian timur (*Ooster Districten*).

Ditengah sejumlah penolakan bahkan pertumpahan darah, “cengkraman” kolonialisme tetap saja tak bisa terbendung. Konfederasi *Tellu Limpoe* harus relah “termodernkan” melalui sistem pemerintahan sampai kepada unsur-unsur pejabat terkecil. Sebagai cabang pemerintahan (*Onderafdeling*) dibawah *Afdeling Bonthain*, perubahan ini tentu saja menjadi pukulan telak dimulai sejak menanamkan kekuasaan hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad dkk. 1981. *Sejarah Perlawanan Imprealisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Dep: P&K.
- Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 21 Februari 1918. "*Laporan Negara (staatsblaad No. 22)*".
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1862. "*Kolonial Verslaag (lembaran negara Negara)*".
- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. *Laporan Controleur atas pemilihan Bagenda sebagai adatgemenschap Tondong*. Arsip Afdeling Bantaeng No. Reg. 11.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. "*Laporan pelaksanaan pemerintahan I. Sinroe daeng Abang, Tabbo daeng Mappoeji, dan Bagenda sampai 1940.*" Arsip Afdeling Bantaeng No. Reg. 11.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. "*Laporan controleur Sinjai tentang pemilihan umum adatgemenschap Tondong oleh seluruh distrik bawahan*". Arsip Afdeling Bantaeng No. Reg. 16.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. "*Pengangkatan Bagenda sebagai Adatgemenschap dilengkapi dengan susunan silsilah kerajaan*". Arsip Afdeling Bantaeng No. Reg. 22.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. "*Pernyataan Adatgemenschap (Verzoeken dj. Vergunning vragen als bedoeld art. 17 laatste alinea reglement notaries ambt)*". Arsip Afdeling Bantaeng No. Reg. 22,
- Bigalke, W. Terance. 2016. *Sejarah Sosial Tana Toraja*. Yogyakarta: Ombak.
- Christine, Nadia Ayu "*Latar Belakang Penerapan Ordonansi Pajak Penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942*" AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 2, No 1, Maret 2014, hlm. 140.
- Kamaruddin. 1966. *Perkembangan Kerajaan Tondong, Bulu-Bulu Dan Lamatti*. (Terjemahan Lontara).
- Kamaruddin. 1994. "Menelusuri Hari Jadi Sinjai Untuk Menyongsong Masa Depan Yang Lebih Cerah. *Makalah Seminar "Sinjai"* Sin.jai. 2-3 September 1994.

- Limbugau, Daud. 1985. "Terbentuknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1824-1874", *Tesis Universitas Gajah Mada* Jogjakarta
- Los, M. A. "*Memorie van Overgave Onderafdeling Pangkajene*" (Mei 1933-Juli 1934), (*bahan Arsip, Leiden: KITLV, H. 903*).
- Mattulada. 2014. "Menelusuri Hari Jadi Sinjai Berdasarka Perkembangan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan". *Makalah Seminar No Makalah: MU – 02.02. Sinjai. 2-3 September 2014*.
- Melamba, Basrin. 2011. *Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk Bone, 1906-1942*. Kendari: Penerbit Larasan, Program Studi Sejarah FKIP UNHALU.
- Mappangara, Suriadi. 1996. *Kerajaan Bone Abad XIX (Konflik Kerajaan Bone-Belanda 1816-160)*, Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada.
- Patunru, daeng Abdurrazak. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Perelaer, M.T.H.1872. *De Bonische Expedition Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 18959-1860*, Leiden: Gualth. Kolft, eerste deel.
- Poelinggomang, L. Edward.2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Kota Makassar 1906-1946*. Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, dkk. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, Makassar: Balitbangda.
- Poelinggomang, "Nasional La Sinrang Tokoh Pejuang Kemerdekaan Dan Kedaulatan", *Makalah Seminar Makassar Golden Hotel: 12 Maret 2007*.
- Rasyid, Abd. 1989. *Pendudukan Belanda di Kerajaan Bulo-Bulo Pada Abad ke XIX-XX*, Skripsi, Ujung Pandang.
- Studi Kelayakan Benteng Balanipa Kab. Sinjai*. 1985. Ujung Pandang: Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan.
- Swaart, H. N. A. "*Momorie van Overgave*" Agustus 1906-Mei 1908, "*Memori van Overgave Celebes I*". Den Haag: ARA, kotak AA. 205.